

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat telah mengubah tatanan dunia melalui kebijakan luar negerinya dari yang tertutup menjadi terbuka. Kebijakan luar negeri merupakan sebuah komponen penting dari sebuah negara khususnya dengan negara sebesar Amerika Serikat yang setiap keputusannya dapat mempengaruhi dunia. Menurut Yanyan Mochamad Yani, kebijakan luar negeri atau politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Menurut definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri adalah sikap dan perilaku sebuah negara di lingkup hubungan internasional dengan tujuan mempertahankan serta mencapai kepentingan nasional. Maka, kita harus melihat lebih dahulu seperti apa kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara umum.<sup>1</sup>

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara umum tentunya ditujukan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dianut oleh Amerika Serikat sebagai negara yaitu prinsip demokrasi, liberalisme, HAM dan perdamaian dunia. Kebijakan ini diterapkan melalui organisasi internasional di mana Amerika Serikat ikut membentuknya seperti

---

<sup>1</sup> Yanyan Mochamad Yani, "Konsep Dasar Politik Luar Negeri," *Politik Luar Negeri* (juni, 2010): under "1," [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf).

PBB, IMF dan WTO melalui perjanjian Bretton Woods.<sup>2</sup> Hal ini telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II, dimana Amerika Serikat mulai menetapkan dirinya sendiri sebagai negara adidaya.

Lalu muncul peristiwa Perang Dingin, dimana terjadi pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di masa ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat semakin gencar untuk mempromosikan ideologi liberalisme dan kapitalisme serta prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan seperti HAM. Mereka juga membuat kebijakan aliansi antar negara yang disebut sebagai NATO untuk memperkokoh posisi ideologinya di dunia. Setelah selesainya periode Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat mulai memprioritaskan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kebebasan perdagangan dan kerjasama internasional. Selain itu, sejak terjadinya tragedi 9/11 pada tahun 2001, kebijakan luar negerinya juga gencar untuk membawa keamanan dunia melalui kebijakan War on Terrorism yaitu perang terhadap terorisme.<sup>3</sup>

Jika dilihat secara detail, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terbelah menjadi dua bentuk yaitu moralis dan realis. Di satu sisi, Amerika Serikat turut memperjuangkan moralisme dengan kebijakan-kebijakan yang menjaga perdamaian

---

<sup>2</sup> Houghton Mifflin Harcourt, "American Government: International Economic Policy," CliffsNotes, accessed April 22, 2021, <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/american-government/economic-policy/international-economic-policy>.

<sup>3</sup> LumenCandela, "The History of American Foreign Policy," Boundless Political Science, accessed April 22, 2021, <https://courses.lumenlearning.com/boundless-politicalscience/chapter/the-history-of-american-foreign-policy/>.

serta kesejahteraan dunia seperti menjaga demokrasi, perdagangan bebas, kerjasama antarnegara, HAM dan keberlangsungan lingkungan. Namun di sisi lain, Amerika Serikat tidak segan-segan untuk menggunakan hardpower dalam kebijakannya demi mencapai kepentingan nasional. Seperti contohnya invasi negara Irak dan Afghanistan dalam rangka memerangi terorisme internasional.<sup>4</sup>

Pada era pemerintahan Donald Trump, kebijakan Amerika Serikat dianggap berbeda dari yang umumnya. Kebijakan luar negeri masa Amerika Serikat masa Donald Trump dinilai lebih ekstrim karena banyak dari kebijakannya yang menerapkan prinsip kepentingan nasional yang diutamakan dan cenderung menarik diri dari organisasi-organisasi internasional. Contohnya, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari UNESCO, TPP dan WHO karena berbagai keputusannya yang dinilai menguntungkan pihak lain dan merugikan Amerika Serikat.<sup>5</sup> Kebijakan mereka juga sangat terpusat kepada keputusan dan insting pribadi Donald Trump sehingga kebijakan yang dikeluarkan cenderung irrasional dan tidak banyak yang menduga. Contohnya saat ia memutuskan untuk bertemu dan berdiplomasi langsung dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Banyak ahli dan pencermat hubungan

---

<sup>4</sup> Howard LaFranchi, "In Iraq, an Assertion of Us 'hard' Power," The Christian Science Monitor, January 15, 2009, <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/0115/p11s02-usfp.html>.

<sup>5</sup> TRT World, "Trump's Top Five Withdrawals from International Agreements," TRT World, June 29, 2018, <https://www.trtworld.com/americas/trump-s-top-five-withdrawals-from-international-agreements-18543>.

internasional tidak menduga bentuk diplomasi seperti ini akan terjadi karena permusuhan yang dalam antara Amerika Serikat dan Korea Utara.<sup>6</sup>

Selain itu, jika dilihat lebih lanjut, banyak kebijakan tersebut yang dibuat berdasarkan kepentingan domestik dan kepentingan dari para pendukung Donald Trump. Dengan prinsip baru bernama “America First”, Donald Trump tentunya memilih untuk mengutamakan kepentingan Amerika Serikat dibandingkan bekerjasama di ranah internasional tanpa manfaat yang jelas. Maka daripada itu, kebijakannya lebih banyak bertujuan untuk mengevaluasi kembali peran dan partisipasi Amerika Serikat di organisasi-organisasi internasional.<sup>7</sup>

Alasan penting untuk mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Trump adalah karena banyak kebijakan tersebut yang bersifat tidak populer dan cenderung berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Berbeda dalam artian kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada umumnya. Contohnya keputusan Amerika Serikat keluar dari organisasi-organisasi internasional sangat tidak mencerminkan prinsip

---

<sup>6</sup> “Reaction to a Meeting Between Trump, Kim Jong Un,” *Voice of America*, last modified March 9, 2018, accessed April 23, 2021, <https://www.voanews.com/east-asia/reaction-meeting-between-trump-kim-jong-un>.

<sup>7</sup> Muhammad Alfian Maulana, *Kebijakan Amerika Serikat di Bawah Donald Trump Keluar dari Rezim dan Organisasi Internasional* (2020), <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/kebijakan-amerika-serikat-di-bawah-donald-trump-keluar-dari-rezim-dan-organisasi-internasional/>.

kerjasama internasional yang merupakan prinsip liberalisme yang dibanggakan negaranya sendiri.<sup>8</sup>

Hal ini juga membawa tanda tanya terhadap peran Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang banyak mengurus konflik-konflik di berbagai kawasan dunia. Pengaruh Amerika Serikat di dunia internasional dianggap sudah mulai menurun karena banyak menarik diri dari keterlibatan kawasan internasional. Contohnya keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari komunitas Trans-Pacific Partnership (TPP) di wilayah Asia Timur. Di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian nuklir Iran yang disepakati oleh pemerintahan sebelumnya.<sup>9</sup>

Sementara itu, kawasan Timur Tengah sendiri juga merupakan kawasan yang sering terjadi konflik antarnegara dan diwarnai oleh dinamika kekuatan negara-negara besar. Di Timur Tengah terdapat 18 negara yaitu Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Qatar, Siprus, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania, Palestina dan Siprus Utara. Jika dilihat secara kekuatan pengaruh dan geopolitik, negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Iran dan Israel merupakan negara dengan status middle power di regional Timur Tengah. Lalu ada juga kehadiran

---

<sup>8</sup> Alex Ward, "Trump's Wildly Unpopular Foreign Policy, in 2 Polls," *Vox* (Vox, October 2, 2018), last modified October 2, 2018, accessed April 23, 2021, <https://www.vox.com/2018/10/2/17928252/trump-poll-chicago-pew-foreign-policy>.

<sup>9</sup> Alex Ward, "Trump's Wildly Unpopular Foreign Policy, in 2 Polls," *Vox* (Vox, October 2, 2018), last modified October 2, 2018, accessed April 23, 2021, <https://www.vox.com/2018/10/2/17928252/trump-poll-chicago-pew-foreign-policy>.

dari negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan negara-negara Uni Eropa yang turut ikut campur dalam dinamika kekuatan di Timur Tengah.<sup>10</sup>

Dinamika kekuatan negara-negara di Timur Tengah seperti diatas tentunya di dasari oleh latar belakang kepentingan dari negara-negara tersebut. Ada pertarungan ideologi yang berbeda antara Iran dan Arab Saudi, konflik perbatasan antara Israel dan Palestina, konflik di Suriah yang melibatkan Amerika Serikat dan Rusia, serta perbatasan antara Turki dan Suriah. Konflik-konflik seperti inilah yang terjadi di Timur Tengah dan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni tentunya seringkali ikut terlibat dalam konflik-konflik Timur Tengah melalui kebijakan luar negerinya. Salah satu yang menarik untuk dibahas juga adalah mengenai hubungan spesial antara Amerika Serikat dengan Israel dimana hubungan diplomatis ini seringkali menjadi alasan dibalik keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Di penelitian ini, penulis akan memfokuskan kebijakan Amerika Serikat dalam fenomena perpindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel-Aviv ke Jerusalem.<sup>11</sup>

Fenomena perpindahan kedutaan Amerika Serikat ini terjadi pada 14 Mei 2018 dengan diresmikannya gedung kedutaan Amerika Serikat yang baru di Yerusalem menggantikan kedutaan yang sudah ada sebelumnya di Tel-Aviv. Di pernyataan resmi

---

<sup>10</sup> Broto Wardoyo, "Dinamika Geopolitik Timur Tengah Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia," *Dinamika Geopolitik Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Indonesia* 5, no. 1 (15 agustus 2020), <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/133>.

<sup>11</sup> Vox, "The Middle East's cold war, explained," Youtube, July 17, 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=veMFCFyOwFI>.



presiden, Trump mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil atas dasar pendekatan yang baru terhadap terhambatnya proses perdamaian dalam konflik antara Israel dan Palestina. Trump menyatakan :

“We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Old challenges demand new approaches. My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians.”<sup>12</sup>

Namun di pernyataan selanjutnya, Trump menegaskan bahwa keputusan ini tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan Israel. Justru pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa ia tetap ingin memfasilitasi negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati oleh kedua negara. Pernyataan lengkapnya berisi :

“In making these announcements, I also want to make one point very clear: This decision is not intended, in any way, to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem, or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved. The United States remains deeply committed to helping facilitate a peace agreement that is acceptable to both sides. I intend to do everything in my power to help forge such an agreement. Without question, Jerusalem is one of the most sensitive issues in those talks. The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> U.S. Mission Israel, “Statement by Former President Trump on Jerusalem,” U.S. Embassy in Israel, December 7, 2020, <https://il.usembassy.gov/statement-by-president-trump-on-jerusalem/>.

<sup>13</sup> Ibid.

Fenomena ini banyak dikecam oleh dunia internasional khususnya negara-negara Islam di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Israel mencatat sekitar 86 negara telah diundang dalam acara pembukaannya namun hanya 32 negara delegasi yang mengonfirmasikan kehadirannya. Negara-negara yang mengecam berpendapat bahwa fenomena ini akan semakin menyulitkan proses perdamaian konflik antara Israel dan Palestina.<sup>14</sup>

Namun pemerintah Israel menyambut baik keputusan ini karena dianggap sebagai bukti konkrit oleh Amerika Serikat dalam mendukung Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Pemerintah Israel berharap banyak negara lain yang akan mengikuti langkah Amerika Serikat dalam memindahkan kedutaannya dan memberikan dukungan untuk Israel dalam pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota. Langkah ini sekaligus menjadi bukti atas pemenuhan janji kampanye Trump terhadap pendukungnya yang sejak Trump menjabat telah menuntut pemenuhan janji ini.<sup>15</sup>

Fenomena ini juga menjadi saksi terwujudnya hukum Jerusalem Embassy Act, dimana hukum ini sebenarnya sudah memberikan mandat bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel dan memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Hukum ini terus tertunda karena di dalam

---

<sup>14</sup> Windu Jusuf and Tony Firman, "Yang Terjadi Setelah Kepindahan Kedubes as Ke Yerusalem Dipercepat," *Tirto.id* (Tirto.id, May 14, 2018), last modified May 14, 2018, accessed October 16, 2021, <https://tirto.id/yang-terjadi-setelah-kepindahan-kedubes-as-ke-yerusalem-dipercepat-cKhb>.

<sup>15</sup> Deutsche Welle (www.dw.com), "Pemindahan Kedubes as Ke Yerusalem Bisa Berakibat Fatal: DW: 06.12.2017," *DW.COM*, last modified December 6, 2017, accessed October 16, 2021, <https://www.dw.com/id/pemindahan-kedubes-as-ke-yerusalem-bisa-berakibat-fatal/a-41669288>.



isinya ada hak khusus untuk presiden yang bernama presidential waiver. Hak presidential waiver ini mengizinkan presiden untuk menunda berjalannya hukum tersebut selama 6 bulan atas dasar untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat.<sup>16</sup> Hak ini telah dilakukan oleh setiap presiden Amerika Serikat sejak terbitnya hukum tersebut dari Clinton, Bush dan Obama hingga Presiden Trump memutuskan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk mengulik lebih lanjut alasan dibalik keputusan Donald Trump untuk mewujudkan pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Maka, penulis memutuskan untuk meneliti kebijakan Donald Trump khususnya mengenai peristiwa perpindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel-Aviv ke Yerusalem dengan memilih topik penelitian “Kebijakan Donald Trump Dalam Peristiwa Perpindahan Kedutaan Amerika Serikat dari Tel-Aviv ke Jerusalem”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Di proposal penelitian ini, penulis memiliki beberapa masalah pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian dan studi kasus seperti latar belakang hubungan spesial antara Amerika Serikat dengan Israel, kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, latar belakang dan proses pembuatan kebijakan Donald Trump dan reaksi dunia

---

<sup>16</sup> Robert Dole, “Jerusalem Embassy Act of 1995,” Jerusalem Embassy Act of 1995 §, accessed December 6, 2021, <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/1322>.

internasional terhadap kebijakan tersebut. Penulis akhirnya memfokuskan kepada tiga masalah yang sudah diidentifikasi yaitu latar belakang dari hubungan Amerika Serikat dengan Israel, faktor-faktor dibalik keputusan Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dan reaksi dunia internasional terhadap kebijakan tersebut. Maka, penulis mengajukannya dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- Mengapa Amerika Serikat mempunyai hubungan yang baik dengan Israel ?
- Apa yang melatarbelakangi keputusan Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel-Aviv ke Yerusalem ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan Donald Trump di Timur Tengah khususnya mengenai fenomena perpindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi dan analisa yang baru terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Donald Trump dan latar belakang dari dibuatnya sebuah kebijakan tersebut serta menilai reaksi dunia internasional akan fenomena ini. Penelitian ini juga memiliki pembahasan yang relevan di masa kini, dimana fokus dari pembahasan ini berkaitan dengan populisme dan politik agama yang sedang banyak digunakan pada masa kini dan juga masa pemerintahan Presiden Donald Trump yang baru saja berakhir.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada bab pertama akan dibahas mengenai pandangan umum dari penelitian yang berisi latar belakang topik, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Pada bab kedua akan dibahas kerangka berpikir yang berisi ringkasan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian serta teori dan konsep Hubungan Internasional yang dapat menjadi struktur pembahasan dari penelitian.

Pada bab ketiga akan dibahas metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian.

Pada bab keempat akan dibahas isi utama dari penelitian yang berisi analisa serta penjelasan penulis mengenai peristiwa perpindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel-Aviv ke Yerusalem berkaitan dengan teori dan konsep Hubungan Internasional. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah.

Pada bab kelima akan dibahas kesimpulan dari penelitian yang berisi rangkuman dari penjelasan dan analisa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.